TEO-EKOLOGI BERBASIS NILAI LOKAL DALAM CITA HUKUM MASYARAKAT SUMBAWA

Oleh :
Lahmuddin Zuhri*

Abstract

Pancasila (five basic principles) serves as the way of life of Indonesian people its first principle regulates the divine values and it is in line with kerik selamat (safety and blessing) which manifests the Islamic values in the cultures and custom in Sumbawa. Kerik selamat is Islamic values living in the society since it is a mirror of the ideal of cultural law of the society. In the nation spirit theory, a law should be born from the nation/society spirits. Good quality regulations should posses three basic principles: juridical, sociological, and philosophical. The value of kerik selamat from an Islamic epistemological dimension spreads in the whole life of the community so that their level of religiousity, karabat (kinship) and saling sating (respect one another) may be maintained sustainably by the people of Sumbawa. Kerik selamat as a norm of life in people of Sumbawa should be recognized and protected because it is a morror of the ideal of law of the people to maintain a harmony so that the value og kinship, and respect among the members of the people may be maintained to keep the oneness and togetherness and also the shame culture (ila). Thi guides them in a strong social tie and legal construction which is full of the values of kinship to keep the existence of the community, and the life pattern in line with the expectation of Gods blessings in the ideal of the law in the people of Sumbawa.

Kata Kunci: teo-ekologi, cita hukum, nilai local Sumbawa.

Pendahuluan

Masyarakat Sumbawa dengan filosofis “*Kerik selamat, Tau ke Tana Samawa*”,¹ memadukan nilai budaya (adat) dengan hukum Islam dalam makna ada pertalian yang utuh antara adat Sumbawa dengan hukum Islam, sehingga kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung dalam masyarakat dan budaya Sumbawa, dalam pernyataan resmi Lambaga Adat Tanah Samawa (LATS) Adat *tau samawa* (masyarakat Sumbawa) adalah *Adat barenti ko syara’*, *syara’ barenti ko Kitabullah*, ini mengandung makna bahwa masyarakat Sumbawa, memelihara (memegang teguh) agama, maka secara otomatis juga memelihara (memegang teguh) adat, begitu pula sebaliknya, memelihara agama mengandung arti memelihara alam dan seisinya, dalam konteks keislaman bahwa manusia ditakdirkan untuk menjadi khalifah, yang berkewajiban mengelola dan memakmurkan bumi (alam semesta) secara bertanggung jawab.

Secara historis, masyarakat Sumbawa yang melihat adat budaya memiliki kesatuan yang utuh dan bulat dengan agama Islam, ini menunjukkan bahwa cita dan kesadaran hukum masyarakat sumbawa dalam kaitannya dengan kehidupan keislaman memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan seperti adanya budaya yang mengedepankan *musakara* (musyawarah) dan *tokal barema* (duduk bersama) serta memohon petunjuk kepada orang yang dituangkan dan dihormati karena memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama dan keilmuan yang lain, hal ini akhirnya terkristalisasi menjadi suatu tradisi. Sejalan dengan pandangan di atas, dalam analisis I Dewa Gede Atmadja⁴, mengemukakan setidaknya terdapat empat momentum “pembentukan hukum,” yang akan berpengaruh terhadap proses pembentukan hukum, yakni: *Momen idiil* berupa kenyataan alamiah dan kemasyarakatan Sumbawa; konfigurasi adalah pandangan hidup dan filsafat hidup (nilai budaya *Kerik selamat* masya-

* Direktur Pusat Studi Hukum dan HAM Univ Samawa. Email: Lahmuddinzuhrri@yahoo.com

Masyarakat Sumbawa adalah masyarakat agraris (petani-peternak), hukumnya harus sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat agraris, yang hidup secara wajar, *kerik selamat* adalah norma dan nilai mereka mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.² Kenyataan yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar sosiologis, termasuk pula kecenderungan dan harapan masyarakat. Tanpa memasukkan faktor-faktor kecenderungan dan harapan maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika. Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan norma dan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.³

rakat Sumbawa); *Momen politik*, berupa aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat (tuntutan masyarakat akan pengelolaan tanah Lar bernasik nilai kearifan lokal *Kerik selamat* yang berpihak kepada eksistensi komunitas, budaya dan ekologi Sumbawa, yang konfigurasinya adalah kepentingan dan tujuan kebaikan alam dan masyarakat Sumbawa (tau ke tana samawa); *Momen normatif*, konfigurasinya adalah cita hukum, nilai-nilai dan asas-asas hukum; *Momen tehnik*, konfigurasinya adalah teknik perundang-undangan”⁵.

Nilai *Kerik Selamat* dari dimensi epistemologi keislaman menyebar di seluruh kehidupan masyarakat sehingga religiusitas, *karabat* (kekeluargaan) dan *saling satinggi* (saling memuliakan) yang kuat akan dipertahankan secara berkesinambungan oleh masyarakat Sumbawa. *Kerik Selamat* sebagai norma yang hidup dalam masyarakat Sumbawa harus mendapatkan pengakuan dan perlindungan karena merupakan cerminan norma keadilan, yaitu norma yang mengatur keharmonisan dalam masyarakat

dapatkan pengakuan dan perlindungan karena merupakan cerminan norma keadilan, yaitu norma yang mengatur keharmonisan dalam masyarakat sehingga terjaga nilai kekerabatan dan saling menghormati antar sesama anggota masyarakat, dengan tujuan untuk menjaga keutuhan dalam kebersamaan. Secara sosiologis, keseharian masyarakat Sumbawa adalah sebuah keluarga besar yang terbangun dari pola komunikasi berdimensi kekeluargaan dan kesederhanaan, yang menuntun mereka dalam ikatan sosial yang kuat, begitu juga konstruksi hukum yang terbangun, kental dengan nilai kekeluargaan guna menjaga eksistensi komunitas, menjaga nilai-nilai kekerabatan, dan bangunan hukum yang ada adalah manipulasi dari keperdayaan dan pola hidup keseharian mereka dalam mengelola alam sebagai petani dan peternak.

II. Kajian Pustaka

2. 1. Ekologi dalam tiga sisi (Manusia, Alam dan Tuhan)

Ekologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi berasal dari kata *Oikos* berarti rumah atau “tempat hidup”⁶ (kemudian diartikan dengan rumah tangga). Dan *Logos* berarti ilmu pengetahuan. Ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya, atau ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup⁷. Atau dapat juga dikatakan Ekologi adalah ilmu pengetahuan tentang hubungan antara organisme dan lingkungannya⁸.

Ilmu ekologi pertama kali dipergunakan seorang biolog bangsa Jerman *Ernst Haeckel* pada tahun 1869⁹. Pada waktu itu ilmu ekologi dijadikan sebagai cabang dari ilmu biologi. Menurut Haeckel, ilmu ekologi diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan yang berhubungan dengan relasi atau kaitan secara total antara organisme dengan lingkungannya yang bersifat organik maupun anorganik¹⁰.

⁴ I Dewa Gede Atmadja, Asas-Asas Pembentukan Produk Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, tanpa tahun, hlm. 6-7

⁵ *Ibid* hal 8

⁶ Nanik Suparni, Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum Lingkungan, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), h. 3

⁷ Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 1994), h. 22 - 23

⁸ S.J. McNaughton dan Larry L. Wolf, General Ecology, (Saunders College Publishing, Second Edition, 1973), p. 15

⁹ Moestadji, Pelestarian Kemampuan Lingkungan Hidup, (Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 1988), h. 3

¹⁰ N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, (Jakarta : Erlangga, 2004), h. 16

¹ *Kerik Selamat, Tau ke Tana Samawa* merupakan falsafah hidup masyarakat Sumbawa yang selalu mengharap Ridho ALLAH SWT, masyarakat Sumbawa berkeyakinan selalu diawasi oleh ALLAH SWT selaku penguasa tunggal semesta alam, sehingga nilai-nilai Ketuhanan selalu menjadi acuan dalam mengelola alam dan berinteraksi antar sesama, *Kerik Selamat, Tau ke Tana Samawa* memberikan landasan moral dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Sumbawa menuju kebehahan (*Kerik*) dan keselamatan (*salamat*) bagi masyarakat (*tau*) dan alam (*tana*) Sumbawa

² Bagir Manan dalam Yuliandri. Op.Cit, hlm 135

³ *Ibid*

sumbawa dapat menjaga keteraturan ekosistem dan komponen-komponen ekosistem satu dengan yang lainnya sesuai dengan fungsinya agar dapat bekerja dengan baik, sesuai mekanisme alam. Berbeda cara pandang penguasaan dan pengelolaan terhadap sumber daya alam (SDA), menyebabkan terjadi eksploitasi terhadap SDA tersebut tanpa memperhatikan daya dukung dan kelestarian ekologi dan ekosistem yang ada. Pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan ekonomi semata, sehingga pola pengelolaan SDA lebih dilihat sebagai sarana ekonomi ketimbang anugerah Tuhan atas kekayaan ekologi dan sosial dalam masyarakat sumbawa¹¹.

Tulisan ini dilakukan untuk mencermati dan memaknai bagaimana nilai dan pola-pola perilaku masyarakat Sumbawa dalam pemanfaatan dan pengelolaan SDA, sehingga kedepan produk kebijakan daerah dapat memposisikan manusia selaku subjek hukum secara bertanggung jawab dan memperhatikan keberlanjutan ekologi, mengelola SDA kedepan harus memperhatikan nilai dan etika yang ada, yang sudah diwariskan oleh leluhur bangsa masyarakat Sumbawa, lewat adat dan kearifan lokal.

Dalam tulisan ini, konsep ekologi atau ekosistem yang menjadi fokus utama adalah ekosistem daratan area pertanian dan pengembalaan. Ekosistem data tersebut akan terjadi keseimbangan dan terjaganya keteraturan ekosistem, apabila hubungan antara komponen-komponen ekosistem satu dengan yang lainnya sesuai dengan fungsi dan bekerja dengan baik. Namun apabila salah satu komponen ekosistem misalnya seperti tanah, rusak akibat alih fungsi lahan dan pemanfaatan yang berlebihan. Penulis berpendapat bahwa perlu adanya transformasi nilai *kerik salamet* dalam peraturan daerah atau kebijakan daerah sebagai landasan hukum perilaku masyarakat sumbawa dalam mengelola lingkungan (tanah) guna menjaga kelestarian lingkungan (ekologi) yang berkelanjutan.

2. 2. Teo-Ekologi

Pembangunan Kabupaten Sumbawa bukan hanya untuk mencapai kesejahteraan untuk kemajuan dan kemandirian, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan. Sebagai pelaksana dan penggerak pem-

angunan sekaligus objek pembangunan, rakyat mempunyai hak, baik dalam melaksanakan maupun dalam menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, masalah keadilan dan kelestarian lingkungan merupakan ciri utama dalam cita hukum masyarakat sumbawa.

Keadilan ini harus tercermin pada semua aspek kehidupan, yang mana semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya, serta perlindungan dan persamaan di depan hukum, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun baik antarindividu, gender, dan wilayah. Kesejahteraan juga terkait dengan terwujudnya keadilan individu dan sosial dalam kehidupan masyarakat Tana Samawa. Dengan demikian masyarakat "*Nyaman Nyawe*" merupakan masyarakat yang maju dan sejahtera.

Dalam tulisan ini lebih fokus pada kajian ekologi dan cita hukum masyarakat sumbawa, yang mana konsepsi kesejahteraan dalam masyarakat Sumbawa memiliki tiga dimensi, yakni dimensi kesejahteraan ekonomis dan kedamaian (*senap semu*), kesejahteraan sosial (*riam remo*) dan kesejahteraan spritual (*Mura era*). Cita hukum masyarakat sumbawa yang terbangun dari nilai kekeluargaan dan semangat kelestarian lingkungan, menjadi modal utama dalam pembangunan hukum. Nilai ini dimaknai, dihayati dan dijadikan pedoman bersama dalam kehidupan masyarakat, semua ini mesti disertai oleh sikap rasional kritis dilandasi nilai-nilai spritual, keimanan kepada Allah SWT sebagai pemilik dan penguasa tunggal atas semesta alam.

Nilai-nilai Ketuhanan inilah yang memahirkan semangat dan etika sosial dalam berintraksi dengan alam. Kalau Kuntowijoyo menggali nilai ketuhanan dari perspektif sosial dan politik, yang melihat dimensi agama pada kehidupan politik, ada hubungan simbiosis antara konsepsi "daulat Tuhan" dan "daulat rakyat" dalam satu kesatuan, yang disebut oleh Sartono Kartodirdjo dan Kuntowijoyo¹² sebagai "teo-demokrasi".

¹¹ Lahmuddin Zuhri. Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Sumbawa. Jurnal Hukum Prasad. Program Magisrel Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Warmadewa. Denpasar. Vol 3. No 1. Hal 1-21. September 2015

¹² Konsep Teo-demokrasi, kekuasaan itu dibatasi oleh rakyat. Kekuasaan itu juga diawasi oleh rakyat, disamping diawasi oleh Tuhan, sehingga kekuasaan menjadi transparan yang panduan oleh nilai-nilai

Dalam politik dan demokrasi yang berketuhanan, Menurut Kuntowijoyo, Tuhan dan manusia harus dibaca dengan “satu” tarikan napas, karena itu ditulis dengan “teo-demokrasi”¹³. Berarti bahwa kekuasaan manusia adalah amanah Tuhan yang harus diemban dengan sungguh-sungguh. Penulis melihat dalam kontek ekologi masyarakat sumbawa jaga sangat kental dengan nilai-nilai Ketauhidan. Artinya ada tanggung jawab manusia (masyarakat sumbawa) kepada Tuhan terkait dengan cara pengelolaan alam.

Dalam tulisan ini saya menggunakan istilah Teo-Ekologi, artinya aktivitas pengelolaan alam dalam kehidupan masyarakat sumbawa yang selalu mengharap Ridho ALLAH SWT, sekaligus masyarakat sumbawa berkeyakinan juga selalu diawasi oleh ALLAH SWT selaku penguasa tunggal semesta alam. Panduan nilai-nilai Ketuhanan mengelola alam sebagai pemenuhan kebutuhan hidup¹⁴ memberikan landasan moral dan filosofis bagi kehidupan masyarakat masyarakat sumbawa.

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian Sosial empiris atau lazim disebut Penelitian *Socio Research* yaitu penelitian yang dilakukan untuk menelaah nilai dan kaidah yang ada dalam masyarakat sebagai suatu kekuatan sosial yang empiris. Penelitian ini dilakukan untuk mencermati dan memaknai secara komprehensif, bagaimana nilai dan pola-pola perilaku masyarakat Sumbawa dalam aktivitas pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan masalah yang peneliti kaji, penelitian ini menggunakan pendekatan sosio kultural. Pendekatan ini dilatarbelakangi oleh pemikiran, bahwa ekonomi tidak terlepas dari kehidupan masyarakatnya berupa nilai dan sikap/prilaku. Saling satingi merupakan nilai lokal budaya Sumbawa, berkaitan dengan penelitian ini, pengamatan adalah penting kepentingan untuk keperluan data dan analisis

data¹⁵. Pengamatan terkait dengan pola kehidupan Teo-ekologi masyarakat sumbawa. Kemudian Analisa dan interpretasi dalam penelitian ini, berupa serangkaian proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar, sesuai sumber, fungsi dan klasifikasi, menjadi suatu uraian atau prase, guna menemukan ide atau tema yang dapat dijadikan hipotesis¹⁶. Kemudian dalam melakukan interpretasi data, peneliti menghasilkan analisis yang baik guna menjelaskan data yang didapat, serta menemukan pola hubungan dari ide atau prase-prase yang ada, dalam bentuk uraian-uraian diskriptif kualitatif¹⁷.

Pembahasan

Nilai-nilai *Kerik selamat* masyarakat sumbawa sebagai wujud wajah Islam dalam hukum adat Sumbawa, yang tergambar dari perlakuan, penghormatan dan perlindungan antara lain perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, harta dan lingkungan. Berdasarkan pada *Teori Maqasid al-Syari'ah*, adat budaya Sumbawa dengan filosofis *Kerik selamat* yang bertujuan menjaga eksistensi komunitas, eksistensi kelestarian alam, yang kesemuanya itu adalah untuk kemanfaatan bersama, guna mendapat keberkahan dan bermanfaat bagi kebutuhan hidup masyarakat Sumbawa.

Secara epistemologi yang mempunyai sumbangan besar bagi terbentuknya pandangan hidup, cita moral dan cita hukum dalam kehidupan sosio kultural masyarakat Sumbawa. Proses ini berjalan sesuai dengan tingkat pemahaman keagamaan masyarakat Sumbawa sehingga memantulkan korelasi antara nilai *kerik selamat* dan realitas sosial masyarakat Sumbawa, yang pada akhlaknya melahirkan norma fundamental bagi masyarakat Sumbawa. Budaya dan agama dalam masyarakat Sumbawa memiliki makna yang sangat penting, yang oleh masyarakat Sumbawa digunakan sebagai pedoman hidup, dalam kontek adat dan budaya juga merupakan sebagai salah satu sumber hukum masyarakat Sumbawa. Sehingga transformasi nilai *kerik selamat* dalam

Ketuhanan yang memberikan landasan moral dan filosofis dalam sistem berdemokrasi, lihat Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia, 2011), hml 111-113

¹³ ibid

¹⁴ Mengelola alam/tanah dalam pemenuhan kebutuhan hidup sebagai petani dan petenak, alam/tanah sumber dan alat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sumbawa (eksistensi masyarakat sumbawa).

¹⁵ Sugioyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet.7). (Bandung: Alfa Beta, 2012, hlm 54

¹⁶ L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm 103; Lihat juga Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi III (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm 104.

¹⁷ L. J. Moleong, *Ibid*, hlm. 103.

kebijakan daerah atau produk hukum daerah menjadi penting.

Peraturan perundang-undangan yang berkualitas, dapat dilihat dari tiga landasan dalam penyusunannya, yaitu: *pertama*, landasan yuridis; *kedua*, landasan sosiologis; dan *ketiga*, landasan filosofis. Pentingnya ketiga unsur landasan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, agar peraturan perundang-undangan yang dibentuk, memiliki kaidah yang sah secara hukum (*legal validity*), dan mampu berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar, serta berlaku untuk waktu yang panjang.

Senada dengan Begir Manan, Menurut Jimly Asshiddiqie¹⁸ membawa landasan administratif dan politik, berkaitan landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan melihat dari sisi teknis pembentukan undang-undang, landasan pembentukan undang-undang haruslah tergambar dalam “konsiderans” suatu peraturan perundang-undangan. Dalam konsiderans suatu undang-undang haruslah memuat norma hukum yang baik, yang menjadi landasan keberlakuan bagi undang-undang tersebut, yaitu terdiri dari:

Pertama landasan filosofis, Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat bernegara hendak diarahkan. *Kedua landasan sosiologis*, bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. *Ketiga landasan politis*, bahwa dalam konsiderans harus pula tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang yang bersangkutan. *Keempat landasan yuridis*, Dalam perumusan setiap undang-undang, landasan yuridis ini haruslah ditempatkan pada bagian konsiderans “Mengingat.” *Kelima landasan administratif*, dasar ini bersifat “fakultatif” (sesuai kebutuhan), dalam pengertian tidak semua undang-undang mencantumkan landasan ini, dalam teknis pembentukan undang-undang, biasanya landasan dimasukkan dalam konsiderans “Memperhatikan”. Landasan ini berisi pencantuman rujukan dalam hal adanya perintah untuk mengatur secara administratif¹⁹. Jika kelima landasan tersebut terpenuhi dalam setiap

proses dan substansi pembentukan perundang-undangan, kiranya keseluruhan undang-undang yang dihasilkan, menjadi undang-undang yang baik, berkualitas, dan berkelanjutan.

Pada pembahasan ini, peneliti akan membuktikan bahwa *kerik selamat* layak untuk ditransformasikan menjadi hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat Sumbawa, dengan tiga faktor pembuktian:

1. *Landasan filosofis*, substansi normatif nilai-nilai *kerik selamat* dalam masyarakat dan budaya Sumbawa melahirkan sikap epistemologi yang mempunyai sumbangan besar bagi terbentuknya pandangan hidup, cita moral dan cita hukum dalam kehidupan sosio kultural masyarakat Sumbawa yang melihat alam adalah amanat Tuhan yang harus dijaga kelestariannya. Proses ini berjalan sesuai dengan tingkat pemahaman keagamaan masyarakat Sumbawa sehingga memantulkan korelasi antara nilai *kerik selamat* dan realitas sosial masyarakat Sumbawa, yang pada akhlaiknya melahirkan norma fundamental bagi masyarakat Sumbawa.
2. *Landasan sosiologis*, sejarah masyarakat Sumbawa yang melihat agama memiliki satuan yang utuh dan bulat dengan agama Islam, ini menunjukkan bahwa cita dan kesadaran hukum dalam kaitannya dengan kehidupan keislaman memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan seperti adanya mekanisme pengelolaan alam (sawah ladang) secara baik dan bertanggung jawab yang memperhatikan daya dukung lingkungan, serta budaya menjaga air bagi kehidupan ternak mereka. hal ini terkristalisasi menjadi suatu tradisi. Akibatnya, saat ini, dimensi lain pengaruh epistemologi keislaman menyebar sampai aspek kehidupan sehingga tingkat religiusitas, dalam pengelolaan alam adalah berkah yang harus dijaga kesinambungan.
3. *Landasan yuridis*, dalam Pancasila, sila pertama yang mengatur tentang nilai-nilai keTuhanan, hal ini selaras dengan nilai *kerik selamat* adalah manifestasi dari nilai Islam dalam wajah budaya dan adat Sumbawa. Kemudian dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal, nilai-nilai agama dan keyakinan dilindungi dan diakui keberadaannya.

¹⁸ Ibid hlm 30

¹⁹ ibid

Memperhatikan ketiga faktor, di atas, pada dasarnya transformasi nilai-nilai kearifan lokal *kerik salamat* dapat dibentuk oleh perilaku dalam masyarakat dan kebudayaan Sumbawa, untuk memberikan kekuatan hukum terhadap perlindungan nilai-nilai *kerik salamat* sebagai sarana penyelesaian konflik pengelolaan lingkungan (sawah ladang) dari hasil kajian peneliti memandang perlu nilai lokal *kerik salamat* diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Berkaitan dengan cita hukum masyarakat yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya²⁰. Cita hukum (*rechtsidee*) tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individual dan kemasyarakatan, tentang kebendaan dan lain sebagainya. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sebagai gambaran masyarakat Sumbawa, sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan.

Cita hukum dalam pandangan *kerik salamat* masyarakat Sumbawa, dalam kacamata terminologi hukum Islam memformulasikan *al-'adah muhakamah* (adat menjadi dasar penetapan hukum) dengan persyaratan adat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunah, dengan syarat: adat tersebut harus secara umum dipraktikkan oleh masyarakat atau sebagian tertentu dari masyarakat; Adat harus menjadi kebiasaan pada saat ditetapkan sebagai rujukan hukum; Adat batal tak kala bertentangan dengan sumber utama hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist; Jika terjadi perselisihan, adat akan diterima sebagai sumber hukum jika tidak ada pihak yang menolak adat tersebut²¹.

Masyarakat Sumbawa dengan filosofis "*Kerik salamat, Tau ke Tana Samawa*", memadukan nilai budaya (adat) dengan hukum Islam dalam makna ada pertalian yang utuh antara adat Sumbawa dengan hukum Islam, sehingga kedua sistem hukum itu telah

lama berlangsung dalam masyarakat dan budaya Sumbawa, dalam konteks keislaman bahwa manusia ditakdirkan untuk menjadi khalifah, yang berkewajiban mengelola dan memakmurkan bumi (alam semesta) secara bertanggung jawab. Aktivitas *tau samawa* (masyarakat/orang Sumbawa) atau siapa pun yang berada pada *tana samawa* (wilayah Sumbawa) harus dilaksanakan dengan mengedepankan adat-istiadat dan nilai agama *tau samawa* (agama Islam). Adat (*urf*) adat dan Sumbawa, ini mempunyai peran signifikan dalam proses penciptaan hukum. Pandangan dan perlakuan masyarakat Sumbawa terhadap lingkungan hidup, dapat dijadikan sumber nilai dalam memberikan sumbangan pemikiran sebagai upaya penyelenggaraan pembangunan yang lebih mempertimbangkan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Sumbawa khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Sejalan dengan apa yang dijelaskan fiqh lingkungan hidup, Pentingnya perlindungan hukum terhadap lingkungan termasuk pada salah dan ladang yang ada di Kabupaten Sumbawa dapat ditinjau berdasarkan instrumen *maqasid al-syariah* yaitu jaminan perlindungan terhadap lingkungan hidup atau yang disebut oleh Ali Yafie dengan istilah *hifdzu al-bi'ah*. *Hifdzu al-bi'ah* adalah pemeliharaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, sehingga penanganannya perlu diletakkan di atas suatu pondasi moral, untuk mendukung upaya penyelamatan lingkungan. Fiqh lingkungan berupaya menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa lingkungan hidup tidak bisa dilepas dari tanggung jawab manusia sebagai amanah dari Allah SWT yang harus di emban²².

Hal inilah yang kemudian menjadi tujuan syari'at/agama (*maqashid al-syari'ah*) yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yakni penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi,¹ dengan empat hal dasar, yaitu :

1. *Rub'u al-Ibadat*, yaitu bagian yang menata hubungan antara manusia selaku makhluk dengan Allah SWT sebagai *khaliqnya*, yakni hubungan transedensi.
2. *Rub'u al-Mu'amalat*, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya

²⁰ Bagir Manan dalam Yulianti. Op.Cit, hlm 135-136

²¹ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. (Bandung: Risalah, 1984), hlm 132-135

²² Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006), hlm 161

dengan sesama untuk memenuhi hajat kehidupannya sehari-hari.

3. *Rub'u al-Munakahat*, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dalam lingkungan dan keluarga.
4. *Rub'u al-Jinayat*, yaitu bagian yang menata pengamanan manusia dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin keselamatan dan ketenramannya dalam kehidupan.

Empat garis besar ini merupakan penjabaran nyata diri rahmat kasih sayang Allah yang meliputi segala-galanya dan yang menandai risalah Nabi Muhammad SAW. Inilah sesungguhnya wajah dari Islam. Empat garis besar ini dalam keutuhannya menata bidang-bidang pokok dari kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan suatu lingkungan kehidupan bersih, sehat, sejahtera, aman, damai dan bahagia lahir batin, dunia dan akhirat.

Titik awal pandangan kita adalah bahwa persoalan lingkungan hidup bukan sekedar masalah sampah, pencemaran, pengrusakan hutan, atau pelestarian alam dan sejenisnya, melainkan ini adalah bagian dari suatu pandangan hidup itu sendiri. Sebab dalam kenyataannya, berbicara lingkungan hidup merupakan kritik terhadap kesenjangan yang diakibatkan oleh pemujian terhadap teknologi yang dalam perjalanan panjang mengakibatkan kemiskinan dan keterbelakangan yang disebabkan oleh struktur yang tidak adil dan ditunjang oleh kebijakan pembangunan yang lebih mengejar pertumbuhan ekonomi semata. Dengan kata lain, masalah lingkungan hidup bersumber dari pandangan hidup dan sikap manusia yang egosentris dalam melihat dirinya dan alam sekitarnya dengan seluruh aspek kehidupannya.

Cara pandangan inilah, norma-norma fiqh yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai Al-Qur'an dan Al-Sunnah, sebagaimana yang dijelaskan di atas seharusnya dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap upaya pengembangan wawasan lingkungan hidup, atau lebih tepatnya pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Akan tetapi, harus jujur diakui bahwa sampai hari ini fiqh belum membahas wacana lingkungan hidup secara utuh dan lengkap dalam bab yang khusus. Ini tidak lain karena pada masa itu, lingkungan hidup belum menjadi masalah yang menyedot perhatian para ahli hukum Islam dan ada pengrusakan ling-

kungan yang mengancam keselamatan kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup terjadi setelah alam dieksploitasi terutama untuk kepentingan industrialisasi. Eksploitasi alam terjadi secara besar-besaran setelah revolusi industri. Kini, setelah lingkungan hidup telah menjadi masalah yang sangat serius hingga mengancam kelangsungan kehidupan manusia, maka perlu dihimpun dan dirangkai sejumlah prinsip, nilai, dan norma, serta ketentuan hukum dari khazanah fiqh sebagai paradigma baru tentang lingkungan hidup.

Pemahaman masalah lingkungan hidup (*fiqh al-bi'ah*) dan penanganannya (penyelamatan dan pelestariannya) perlu diletakkan di atas suatu fondasi moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini yang ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah ada dan masih terus berlangsung. Fiqh lingkungan hidup berupaya menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab manusia yang beriman dan merupakan amanat yang diembannya untuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan Sang Pencipta yang Maha Pengasih dan Penyayang sebagai hunian tempat manusia dalam menjalani hidup di bumi ini.

Manusia yang beriman dituntut untuk memfungsikan imannya dengan meyakini bahwa pemeliharaan (penyelamatan dan pelestarian) lingkungan hidup adalah juga bagian dari iman itu sendiri. Itulah wujud nyata dari statusnya sebagai khalifah di bumi, mengemban amanat dan tanggung jawab atas keamanan dan keselamatan lingkungan hidup. Lingkungan hidup harus terpelihara dengan berakibat mengancam hidupnya sendiri.

Islam berbicara mengenai hidup dan kehidupan secara umum dan mendasar yang meliputi alam semesta dan hari akhir atau hari depan yang berkepanjangan bagi alam raya tersebut. Fiqh berbicara mengenai realita kehidupan manusia secara rinci dan bagaimana menata kehidupan tersebut selaku bagian integral dari kehidupan itu. Dari sudut pandang inilah, fiqh ikut berbicara tentang masalah lingkungan hidup yang kini menjadi masalah dunia dan masalah kemanusiaan.

Islam sebagai panutan mayoritas rakyat Indonesia bahkan juga panutan sejumlah besar masyarakat sumbawa, banyak memberi petunjuk kepada

masyarakat Sumbawa tentang upaya penyelamatan hidup dan eksistensi komunitas masyarakat Sumbawa, baik menyangkut kehidupan pribadinya maupun kehidupan masyarakatnya ataupun kehidupan lingkungan yang lebih luas. Nilai keagamaan (Islam) menjadi hal yang penting dalam formulasi asas dan norma hukum.

Apa yang dikelukan Papi Umbe²³ (papi berarti Kakek dalam bahasa Sumbawa), beliau mengulas tentang nilai-nilai Islam dalam perjuangannya dengan nilai lokal Sumbawa, menurut beliau hukum adat Masyarakat Sumbawa yang telah dijiwai oleh nilai-nilai Islam permulaan, sehingga nilai-nilai dasar tentang kebenaran bersumber dari agama Islam, Islamlah yang menjiwai masyarakat Sumbawa dalam berpikir, bertindak dan sebagainya. Secara umum keseluruhan hukum Islam Adalah *Rahmatan Lil Aalam*, dalam filosofis Sumbawa nilai Islam adalah saran menuju *Kerik salam*, yaitu keselamatan dan keberkahan di dunia dan akhirat.

Penutup

Pengembangan wawasan lingkungan hidup, atau lebih tepatnya pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup, dengan asas *Rub'u al-Munakahat*, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dalam lingkungan dan keluarga. Masyarakat Sumbawa memandang bahwa persoalan lingkungan hidup bukan sekedar masalah sampah, pencemaran, pengrusakan hutan, atau pelestarian alam dan sejenisnya, melainkan ini adalah bagian dari suatu pandangan hidup itu sendiri. Dengan kata lain, masalah lingkungan hidup bersumber dari pandangan hidup dan sikap manusia yang egosentris dalam melihat dirinya dan alam sekitarnya dengan seluruh aspek kehidupannya. Cara pandangan inilah, norma-norma fiqh yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai Al-Qur'an dan Al-Sunnah, sebagaimana yang dijelaskan di atas seharusnya dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap upaya pembangunan hukum berbasis Toe-Ekologi.

Fiqh lingkungan hidup berupaya menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab manusia yang beriman, merupakan amanat untuk memelihara dan melindungi

alam yang dikaruniakan Allah SWT kepada manusia. Sehingga orang beriman dituntut untuk memfungsikan imannya dengan meyakini bahwa pemeliharaan (penyelamatan dan pelestarian) lingkungan hidup adalah juga bagian dari iman itu sendiri. Itulah wujud nyata dari statusnya sebagai khalifah di bumi, mengemban amanat dan tanggung jawab atas keamanan dan keselamatan lingkungan hidup. Islam sebagai panutan memberi petunjuk kepada masyarakat Sumbawa tentang upaya penyelamatan hidup dan eksistensi komunitas masyarakat Sumbawa, baik menyangkut kehidupan pribadinya maupun kehidupan masyarakatnya ataupun kehidupan lingkungan yang lebih luas. Nilai keagamaan (Islam) menjadi hal yang penting dalam formulasi asas dan pembangunan hukum, menuju *Kerik salam*, yaitu keselamatan dan keberkahan di dunia dan akhirat bagi *tau ke tana samawa*.

...

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. (Bandung: Risalah, 1984)
- Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006)
- I Dewa Gede Atmadja, *Asas-Asas Pembentukan Produk Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, tanpa tahun.
- J. Mc.Naughton dan Larry L. Wolf, *General Ecology*, (Saunders College Publishing, Second Edition, 1973)
- L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)
- Lahmuddin Zuhri. *Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Sumbawa*. Jurnal Hukum Prasada. Program Magisrel Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Warmadewa. Denpasar. Vol 3. No 1. Hal 1-21. September 2015
- Moestadji, *Pelestarian Kemampuan Lingkungan Hidup*, (Jakarta : Kejaksaan Agung RI, 1988)
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta : Erlangga, 2004),
- Naniek Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994)

²³ Peneliti berdialog dengan Papi Umbe pada Ahad siang 9 Februari 2014